

**PERAN PEMERINTAH DESA DRIEN RAMPAK DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik**

DICKY SAGITA PUTRA

1505905010012



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT**

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Meulaboh, 02 Januari 2023

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Dicky Sagita Putra
NIM : 1505905010012

Dengan judul : Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan Gampong

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


NODI MAREFANDA., M. AP

NIP.198909022019031010

Mengetahui,



NIP. 196307131991021002



NIP. 199005122019032026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisp.utu.ac.id, e-mail : fisp@utu.ac.id

Meulaboh, 02 Januari 2023

Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:
Nama : Dicky Sagita Putra
NIM : 1505905010012

Dengan judul : Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam
meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan
Musyawarah Pembangunan Gampong

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk lulus.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Nodi Marefanda, M. AP
2. Anggota : Safrida, S. Sos., M. AP
3. Anggota : Agatha Debby Reiza
Macella, S. AP., M. Si



PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Sagita Putra

NIM : 1505905010012

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 02 Januari 2023

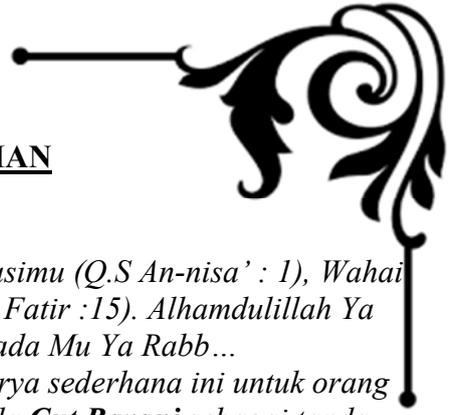
Saya yang membuat pernyataan,



DICKY SAGITA PUTRA

NIM. 1505905010012

KATA PERSEMBAHAN



Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' : 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi.. Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb...

*Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **Slamet Riyadi** dan Ibunda **Cut Bayani** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada Bapak dan nyanyak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.*

*Terima kasih ku ucapkan kepada Om **Azhar Ibrahim, SH** dan Bunda dr. **Cut Briz Santi** yang sudah membantu dalam segala hal serta kebutuhan saya semasa kuliah dan terima kasih ku ucapkan kepada saudara - saudara kandungku, **Fani Sri Wahyuni** (adik), **Riyan Septiano** (adik), yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.*

*bapak dosenku yang baik hati **Nodi Marefanda, M. AP** izinkanlah aku mengantarkan ucapan terimakasih untukmu, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungiku gelar sarjana. Serta kepada Ibu **Safrida, S.Sos., M.AP** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja Ibu demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada Ibu **Agatha Debby Reiza Macella, S. AP., M. Si** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.*

*Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat – sahabat dekat saya **Teguh S. Prakarsa, S. I. Kom, S dan Ridwan, S. An, Adhuha Ultra Bugis**, yang telah membantu dan menemani saya semasa perkuliahan dan sampai sekarang ini dan juga teman-teman Administrasi Negara seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.*

Alhamdulillah

DICKY SAGITA PUTRA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH GAMPONG DRIEN RAMPAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN GAMPONG”**, dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal Skripsi/Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai kesulitan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moral maupun materi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Ucapan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat penulis sayangi dengan rasa penuh cinta penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Bapak Dr. Ishak, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh.
3. Bapak Basri, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Teuku Umar Meulaboh.
4. Ibu Safrida, S. Sos., M. AP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Teuku Umar Meulaboh.

5. Bapak Nodi Marefanda, M. AP, selaku Dosen Pembimbing yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Ibu Agatha Debby Reiza Macella., S. AP., M. Si selaku penguji dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya.

Meulaboh, 02 Januari 2023

Penulis

DICKY SAGITA PUTRA

ABSTRACT

Writing this thesis aims to describe the role of the Government of Gampong Drien Rampak in increasing community participation in Gampong Drien Rampak because the research looks at cases in the field that the people in Gampong Drien Rampak are still relatively lacking in community participation. The purpose of this research is to find out how the role of the Gampong Drien Government Rampak in increasing community participation in Village Development Planning Consultation activities to find out what are the obstacles to the Gampong Drien Rampak government in increasing Community Participation in Village activity deliberation activities. The method used in this research is descriptive qualitative research method and the informants used in this research are 17 (seventeen) people. Data collection techniques used are documentation and interviews. The results of the study show that the role of the village government in increasing community participation in village development planning deliberations is still lacking, because community participation in contributing ideas is seen from the low level of attendance, the response of the community to the opportunity given to participate in musrenbang is to express opinions, suggestions/suggestions as well. low, even in hamlet meetings the community does not participate in giving their ideas or aspirations, the Government of Gampong Drien Rampak is still lacking in increasing community participation in Gampong Drien Rampak.

Keywords: *Role, Village goverment, public, participation*

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini mendeskripsikan Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak dikarenakan penelitian lihat dari kasus di lapangan bahwasanya Masyarakat di Gampong Drien Rampak masih tergolong kurang dalam partisipasi masyarakatnya, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan musyawarah kegiatan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa masih kurang, karena partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dilihat dari tingkat kehadiran rendah, respon masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam musrenbang untuk mengungkapkan pendapat usulan/saran juga rendah, dalam musyawarah Dusun pun masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberi ide-ide atau aspirasi mereka, Pemerintah Gampong Drien Rampak masih kurang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Masyarakat, partisipasi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Pemerintah Desa	13
2.3 Konsep Peran Pembangunan Desa	14
2.4 Partisipasi Masyarakat	16
2.5 Musyawarah Perencanaan Desa	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Informan	21
3.3 Posisi Riset	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Pengujian Kredibilitas Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
4.1 Gambaran Umum Gampong Drien Rampak	27
4.1.1 Visi Misi Gampong Drien Rampak	31

4.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	35
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa	39
1. Peran Pemerintah Gampong dalam bersosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	41
2. Peran Pemerintah Gampong dalam musyawarah di tingkat Dusun	42
3. Peran Pemerintah Gampong dalam merespon keluhan masyarakat di Gampong Drien Rampak	43
4. Peran Pemerintah Gampong dalam musyawarah di tingkat Gampong.....	44
5. Peran Pemerintah Gampong dalam membentuk dan pengembangan program Usaha Milik Gampong	45
4.2.2 Hambatan Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	47
1. Faktor Eksternal	47
2. Faktor Internal	48
BAB V PEMBAHASAN	49
5.1 Peran Upaya dan Hambatan Pemerintah Desa Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	49
5.1.1 Peran Pemerintah Gampong dalam bersosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	51
5.1.2 Peran Pemerintah Gampong dalam musyawarah di tingkat Dusun	52
5.1.3 Peran Pemerintah Gampong dalam merespon keluhan masyarakat di Gampong Drien Rampak	53
5.1.4 Peran Pemerintah Gampong dalam musyawarah di tingkat Gampong.....	55
5.1.5 Peran Pemerintah Gampong dalam membentuk dan pengembangan program Usaha Milik Gampong	56
5.2 Hambatan Pemerintah Desa Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	57
1. Faktor Eksternal	58
2. Faktor Internal	59
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1. Informan Penelitian	22
Tabel : 4.1. Jumlah Penduduk Gampong Drien Rampak	28
Tabel : 4.2. Jenis dan Jumlah pekerja di Gampong Drien Rampak	28
Tabel 4.3. Jumlah pecari pekerjaan menurut tingkatan pendidikan	29
Tabel 4.4. Jenis sarana prasarana sekolah di Gampong Drien Rampak	29
Tabel 4.5. Jenis sarana prasarana Kesehatan di Gampong Drien Rampak	30
Tabel 4.6. Jenis sarana prasarana Tempat Ibadah di Gampong Drien Rampak	30
Tabel 4.7. Jenis sarana prasarana Umum di Gampong Drien Rampak	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto Absensi kehadiran musyawarah dusun	43
Gambar 2 : Foto Kehadiran masyarakat di musyawarah dusun	43
Gambar 3 : Foto Absensi kehadiran Musyawarah Gampong	45
Gambar 4 : Foto kehadiran masyarakat Musyawarah Gampong	45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Penelitian	66
LAMPIRAN 2 Informan Penelitian	67
LAMPIRAN 3 Struktur Organisasi	68
LAMPIRAN 4 Permohonan Izin Penelitian	70
LAMPIRAN 5 Surat Selesai Penelitian dari Gampong	71
LAMPIRAN 6 Dokumentasi Wawancara	72
LAMPIRAN 7 Biodata	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat disini adalah bagaimana kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah Gampong dalam merencanakan struktur pembangunan desa, dan pembiayaan apa saja yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sehingga dalam keterlibatan ini bisa disebut juga pemberdayaan masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat ini bisa melatih kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, dan lebih peka terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya (Sarifah, 2016).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dan angka 6 memiliki arti Pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang artinya bahwasanya desa yang mempunyai status badan hukum sendiri, pemerintah desa juga berwenang membuat peraturan-peraturan desa secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah Daerah dan yang menyetujui peraturan-peraturan tersebut ialah Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) atau di Aceh disebut Tuha Peut. Desa disebut juga di Aceh adalah Gampong telah dianggap sebagai pedoman terhadap pembangunan sekaligus yang disebut dengan *Bottom Up*, bisa diartikan semua rencana, strategi, dan relasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi dari

masyarakat. Masyarakat di dalam pembangunan mengambil peran penting dalam mengambil keputusan, yang artinya ketika pemerintah Gampong melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat gampong tersebut dinyatakan mubazir, karena tujuan pembangunan tersebut ialah mesejahterakan masyarakat. Pemahaman tentang desa adalah suatu organisasi pemerintah secara politis mempunyai hak untuk mengurus masyarakatnya. Dalam keadaan ini desa mempunyai peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan Nasional secara luas. Dengan demikian sangat masuk akal bahwa pembangunan Gampong sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan Nasional (Dahlan dkk, 2012).

Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Dalam penyelenggarannya pembangunan paling awal dan tahapan yang paling penting dalam pembangunan desa ialah tahap perencanaan. Perencanaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pembangunan, Oleh karena itu dalam perencanaan pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan (partisipasi), Dengan kata lain sukses dari pembangunan Gampong adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Gampong. (Arif, 2006).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjamin adanya kepastian partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Lebih tegasnya pada pasal 80 Undang-Undang 2014, yang berbunyi Perencanaan pembangunan Gampong diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan Gampong. Pada undang-undang diatas bisa diartikan bahwasanya partisipasi masyarakat sangat lah penting bagi pembangunan desa di dalam undang-undang tersebut juga ada bunyinya bahwasanya dalam penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Apabila perencanaan suatu desa kalau tidak ada campur tangan dari masyarakat itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik karena prioritas negara, karena desa yang maju itu atas aspirasi dari masyarakat di desa tersebut (Wasil, Mohammad, 2014).

Pembangunan Gampong ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk ikut serta di dalam pembangunan yaitu, adanya saling bergantung antara pemerintah Gampong dengan masyarakat dimana Pemerintah Gampong memerlukan masyarakat untuk memberikan dukungan atas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sendiri memerlukan pembangunan pada desa untuk keperluan masyarakat, seperti penyediaan jalan, drainase, dan pemberdayaan masyarakat. pembangunan desa warga wajib berfungsi berarti dalam proses pembangunan desa sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab warga dalam penerapan pembangunan desa tersebut. pembangunan desa harusnya memiliki sasaran yang pas, sehingga sumber energi yang kurang dapat di manfaatkan secara efektif serta efisien. Sesuatu pembangunan hendak terlaksana dengan baik apabila pembangunan tersebut betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Maka dari itu berhasilnya suatu proses pembangunan tersebut diperlukan nya pemberdayaan masyarakat, mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada akhir proses pembangunan tersebut (Usman, Suyoto, 2010).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) adalah suatu musyawarah yang di lakukan oleh Kepala Desa dan struktur organisasi pemerintah desa dan Badan musyawarah perencanaan desa untuk membuat

perencanaan pembangunan desa dengan aspirasi rakyat. Pada musyawarah ini pemerintah sangat memerlukan masukan dari masyarakat untuk keperluan pembangunan, karena yang menjadi objek dalam pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat desa, kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. bagaimana pemerintah desa menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah tersebut karena di tekankan kembali aspirasi masyarakat desa sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan desa. Musrenbang Gampong yang dibuat oleh pemerintah Gampong dalam per 1 Januari adalah RPJP (Rencana Pembangunan Jangka pendek yang membahas tentang apa saja yang di perlukan masyarakat di Desa tersebut dan mengaitkan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) apa aspirasi masyarakat ini dapat di ambil oleh pemerintah Gampong dalam rencana pembangunan (Satries, Ishardino, 2010).

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, tepatnya dibagian tengah kota Meulaboh dan berdekatan dengan Mesjid Agung Baiturahim, Desa Drien Rampak mempunyai 6 dusun yaitu Dusun Jurong Bangkawali, Dusun Jurong Seulanga, Dusun Jurong Jeumpa, Dusun Jurong Meulur, Dusun Jurong Melati, dan Dusun Jurong Keupula, berbatasan Utara dengan Gampong Gampa dan Gampong Darat, Timur berbatasan dengan

Gampong Rundeng, Selatan Berbatasan dengan Ujong Baroh, Barat Berbatasan dengan Gampong Seuneubok.

Observasi awal pada hari sabtu, tanggal 04 Juni 2022, Pemerintah Desa Drien Rampak dengan masyarakatnya belum menjalin hubungan yang optimal sehingga masyarakat di Desa Drien Rampak belum bergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan Musyawarah Perencanaan Desa dan banyak dari masyarakat yang tidak hadir dikarenakan kesibukan pekerjaan sehingga pemerintah hanya melibatkan beberapa orang untuk mewakili masyarakat saja. Sehingga masyarakat beranggapan bahwasanya mereka tidak diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan Musyawarah Perencanaan Desa Drien Rampak.

Wawancara terhadap beberapa masyarakat di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat oleh pemerintah Gampong untuk mengundang masyarakat dalam kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah Gampong hanya orang-orang yang menurut pemerintah Gampong yang berperan penting saja yang di ajak untuk berpartisipasi pada kegiatan ini, dan pada kenyataan yang peneliti teliti dilapangan bahwa pemerintah Gampong sudah memberi mandat kepada setiap Kepala Dusun untuk mengundang atau memberitahukan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan musyawarah kegiatan pembangunan Gampong akan tetapi ada beberapa Kepala Dusun yang kurang aktif dalam bersosialisasi kepada masyarakat disetiap dusun.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti tertarik meneliti tentang **Peran Pemerintah Desa Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan**

Gampong. Ketertarikan peneliti ini terhadap judul diatas apabila program ini dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ataupun dalam bidang lainnya, Khususnya Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kendali dari program pembangunan desa ini harus ditangani langsung oleh pemerintah Gampong serta perlunya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan Gampong. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti program pembangunan desa karena jika program pembangunan desa itu mengikutsertakan masyarakat maka pembangunan akan terlihat jelas dan tidak ada penyimpangan antara pemerintah desa dengan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang di hadapi oleh Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan wahana referensi bagi penulis dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan kenyataan yang ada di lapangan dan dapat dijadikan referensi kepada mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak Gampong dan diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan pemerintah Gampong.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah untuk tujuan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang berisikan teori-teori yang mendukung jalan Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, yang berisikan tentang teori apa saja yang akan digunakan oleh si peneliti, seperti Teori Penelitian, Sumber Data, Informan, Pengumpulan Data, Teknik Penyusunan Data, Instrument Penelitian.

BAB IV : Bab ini memuat gambaran umum yang terjadi di lokasi penelitian terhadap Peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan Gampong.

BAB V: Bab ini menerangkan tentang Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan Gampong.

BAB VI :Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman untuk penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu, agar dapat menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaan perbedaannya. Dengan demikian peneliti yang akan mendapatkan perbedaan tersebut.

Erick Saputra (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa”. Tujuan Dari Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa dan ingin mengetahui tentang apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan pendekatan Kualitatif, Hasil dari Penelitian ini adalah bahwasanya peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, dan kerjasama dengan antar pemerintah dan masyarakat pun sudah berjalan dengan baik dan semua perancangan pembangunan tersebut pun sudah berjalan dengan baik akan tetapi sebagian kecil dari masyarakat di desa itu masih tidak sejalan pemikirannya dengan pemerintah desa. perbedaan dengan judul skripsi saya adalah Erick Saputra (2020) dia meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang pembangunan desa, sedangkan saya meneliti tentang

kedudukan pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong. Persamaannya dengan judul skripsi saya adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Epianu Halawa dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Medan. Tujuan Dari Penelitian ini Untuk menemukan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam peran pemerintah desa dalam menumbuhkan jiwa partisipasi masyarakat masih kurang dan pemerintah desa belum benar-benar mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa, dan pemerintah desa masih memakai system lama dimana semua keputusan ada di tangan Kepala Desa. perbedaan dengan judul skripsi saya adalah Epianu Halawa dkk (2020) dia meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang pembangunan desa, sedangkan saya meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan persamaannya, sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Persamaannya dengan judul skripsi saya adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Desma yuliandra (2013) melakukan penelitian yang berjudul peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB

(Pajak bumi dan bangunan) dibalai desa karya baru, kecamatan alang-alang lebar, kotapalembang. Tujuan Dari Penelitian ini Untuk mengetahui apa saja aspek-aspek penghambat dari pemerintah desa dalam mendesak warga karya baru untuk berpartisipasi dalam program PBB (pajak bumi dan bangunan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini kepala desa sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat agar berkontribusi dalam program PBB. Hal ini dikarenakan masyarakat dan kepala desa saling berkontribusi dan mendukung serta merealisasikan program tersebut dengan respond dan antusiasme dengan bagus. perbedaan dengan judul skripsi saya adalah Desma yuliandra (2013) dia meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang Program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan saya meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa. Persamaannya dengan judul skripsi saya adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Ismail Umar, Dkk (2013) melakukan penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Desa Basau Jaya Umum. Tujuan Dari Penelitian ini Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Basau Jaya Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini kepala desa sangat Pandai dalam hal membuat perencanaan untuk desanya tetapi dari pihak masyarakatnya kurang dalam partisipasi untuk menyukseskan dalam program program tersebut dan kepala desa pun tidak ada tindak lanjut untuk membuat masyarakatnya berpartisipasi dalam

program-program yang di buat oleh kepala desa.perbedaan dengan judul skripsi saya adalah Ismail Umar Dkk (2014) dia meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang pembangunan desa, sedangkan saya meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa. Persamaannya dengan judul skripsi saya adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Rabia Gani, Dkk (2016) melakukan penelitian yang berjudul Peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Tujuan Dari Penelitian ini Untuk mengetahui pemerintah dalam pembangunan di Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Untuk mengetahui faktor apa saja yang di hadapi oleh pemerintahan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian pemerintah Desa Dulamayo Utara sudah sangat optimal tetapi dari masyarakatnya kurang partisipasi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pendidikan, kekurangan ekonomi, dan banyak hal yang memengaruhi aktifitas untuk melakukan partisipasi untuk Desa. perbedaan dengan judul skripsi saya adalah Rabia Gani, Dkk (2016) dia meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang pembangunan desa, sedangkan saya meneliti tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa. Persamaannya dengan judul skripsi saya adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam arti yang di persempit artinya yakni seluruh kegiatan, tugas, guna serta kewajiban yang di hibahkan oleh negeri buat melaksanakan sesuatu lembaga Negeri buat menggapai tujuan Negeri. Hirarki pemerintah negara di Indonesia dimulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau kota, Desa. Sistem pemerintah Indonesia dijalankan lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa sentra kekuasaan politik lokal yang diberi kekuasaan oleh pemerintah melalui Kepala Desa serta perangkatnya. Posisi pemerintah desa pula sangat berarti, sebab kebanyakan penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan. Dalam melaksana tugas serta kewajiban pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat lewat BPD serta mengantarkan laporan menimpa penerapan tugas-tugasnya kepada Bupati ataupun Camat. Tidak cuma BPD desa pula berwenang buat membuat lembaga kemasyarakatan yang lain sesuai dengan kubutuhan desa semacam contohnya lembaga mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan warga Desa. Lembaga kemasyarakatan ini dibangun atas prakarsa warga desa serta menimpa sasaranya cocok dengan kebutuhan Desa. Lembaga kemasyarakatan ini contohnya mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, penerapan, pengendalian pembangunan yang bertujuan buat kesejahteraan warga. (Sugiman, 2018).

Perangkat Desa sebagai penyelenggara pembangunan juga harus ikut serta dan bertanggung jawab atas perubahan masyarakat dari segi sosial. Untuk itu sebagai kepala pemerintahan Desa harus berusaha dalam mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dan berpikir keras dan berbuat rasional dalam

mengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat Desa. Pemerintah Desa pula wajib mengambil kedudukan berarti selaku dinamisator, katalisator, ataupun selaku pembentuk dalam tiap pergerakan pembangunan buat mendapatkan sokongan dari warga Desa. Selaku dinamisator pastinya kepala desa wajib mempunyai keahlian dalam membagikan tutorial, pengarahan, ataupun dalam mengajak berpartisipasinya warga Desa. (Mondong, 2013).

1. Selaku katalisator ini berkaitan dengan aparatur Desa dalam memandang serta mengkoordinasi langsung dalam proses kemajuan dari pertumbuhan pembangunan Desa.
2. Selaku Polopor ini berkaitan dengan segala anggota Pemerintah desa yang wajib berikan contoh yang baik terhadap warga biar pemerintah desa bisa dihargai dan disegani oleh warga desa (Mondong, 2013).

Pemerintah desa yang di pimpin oleh kepala Desa dibantu oleh BPD (badan permusyawaratan Desa), yang merupakan lembaga perwujudan dari penyelenggara pemerintah ditingkat Desa. Disamping itu, juga pemerintah memberi wewenang kepada desa untuk membentuk mitra dalam pemberdayaan masyarakat (Mustanir2018).

2.3 Konsep Peran Pembangunan Desa

Secara umum peran ialah pengaruh yang berhungan dengan status atau kedudukan social. Menurut Ahmadi (2005) peran adalah aspek dinamis dalam sebuah kedudukan, dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dialah yang menjadi peranan penting dalam suatu permasalahan. Adapun pendapat lain tentang peran yaitu peran normative, peran

normative adalah suatu hubungan dengan tugas dan kewajiban, contohnya seperti polisi menegakkan hukum terhadap nara pidana, artinya dimana posisi polisi tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap nara pidana tersebut.

Peran merupakan rangkaian yang sudah teratur yang ditimbulkan oleh jabatan sebagai manusia kita sudah ditakdirkan sebagai makhluk hidup sosial yang cenderung hidup berkelompok. Didalam berkehidupan berkelompok sudah pasti akan adanya interaksi antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Didalam suatu interaksi akan tumbuh rasa tertergantungan dan rasa ketergantungan tersebut disebut peran (Role), Peran ialah suatu aspek dinamis dari kedudukan seseorang bilamana seseorang tersebut melaksanakan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebutlah yang telah menjalankan suatu peranan penting dalam kedudukannya. Akan lebih baik kita pahami bahwa peran disini meneliti tentang peran pemerintah Desa terhadap Dampak Lingkungan Hidup (Ahmadi, 2005).

Sosiolog Glen Elder (dalam suwarno, 2010) berpendapat dan memperluas arti dari peran bahwasanya setia masyarakat mempunyai perilaku sesuai dengan usia yang berlaku di masyarakat, Teori Peran dapat digambarkan sebagai interaksi sosial dalam teknologi dimana masyarakat bermain sesuai dengan yang diterapkan budaya, sesuai dengan teori ini dapat disebut teori ini adalah pemahaman bersama yang dibawa kita untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat disimpulkan dari beberapa ahli bahwa peran adalah aspek dinamis dalam bertindak atau berperilaku dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh badan, perorangan atau lembaga pemerintahan, Pembangunan desa ialah berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan Desa. Program

dari pembangunan Desa tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi bagaimana pemerintah Desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam menyambung kehidupan ekonomi dan sosialnya. Pengerahan partisipasi warga dalam pembangunan Desa untuk meningkatkan masyarakat tumbuh secara mandiri yang maknanya yakni keahlian warga (*Ewpowerment*) buat bisa menyusun perencanaan buat penuhi kebutuhan serta membongkar permasalahan, sehingga dalam pembangunan mereka dapat bisa menuntaskan permasalahan dengan efisien serta efesien.

Berkaitan dengan teori kedudukan diatas hingga yang penulis pakai yakni Undang- Undang No 6 Tahun 2014. Bahwasanya desa ataupun adat yakni kesatuan warga hukum yang mempunyai sesuatu batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah ditingkat Desa, kepentingan warga setempat bersumber pada kebutuhan warga, hak asal-usul, serta adat tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negeri Republik Indonesia (Zifatma 2013, dalam Erick Saputra).

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa diartikan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan membuat keputusan dalam pembangunan, baik itu dalam pelaksanaan program maupun dalam proses evaluasi dalam proses pembangunan tersebut, dalam pelaksanaan tersebut sangat dibutuhkan kontribusi masyarakat dalam sumber daya dan kerjasama antar pemerintah Desa dan Masyarakat dalam seluruh kegiatan yang ada di Desa. Syarat Partisipasi Warga di atur dalam Undang- Undang No 32 tahun 2014, tentang pemerintah Wilayah serta pergantian, ialah pasal 354 Bab XIV menimpa partisipasi Warga. Pada pasal tersebut

dipaparkan wujud partisipasi warga berbentuk musyawarah, kemitraan, konsultasi publik, penyampaian aspirasi, pengawasan, serta keterlibatan warga lain yang cocok dengan syarat perundang-undangan tersebut. Warga dalam partisipasinya dapat dikatakan kekuatan control serta keseimbangan antara pemerintah desa dengan warga. (Erick Saputra, 2020) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat terdiri 4 tingkatan yaitu partisipasi dalam membuat keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta penilaian.

Berikut aktivitas partisipasi warga yang wajib dicoba tiap warga disuatu desa:

1. Jadi anggota kelompok masyarakat
2. Mengaitkan diri dalam dialog kelompok
3. Mengaitkan diri dalam aktivitas organisasi yang menuju ke partisipasi warga serta mengajak warga lain buat menjajaki aktivitas tersebut
4. Menggerakkan sumber energi masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan(Saputra, 2020)

Partisipasi warga dalam penerapan pembangunan Desa ialah ketentuan utama yang hendak melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi warga dalam suatu pembangunan tidak cuma ditatap selaku bagian proses tapi sudah menjadi sebuah tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari keberhasilan khusus dari proses pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat akan menjadi dua tujuan yaitu penyelenggara pembangunan dan tujuan dari pembangunan tersebut. Ada faktor penghambat partisipasi masyarakat secara faktor *internal* dan *eksternal*.

1. Faktor Internal

Menurut (Saputra, 2020) faktor internal yang berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok itu sendiri. Seperti perbedaan umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan sedangkan

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (Saputra, 2020) dalam faktor eksternal ini yang punya pengaruh besar terhadap keberhasilan program, contohnya kepala Desa atau perangkat desa.

2.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan ialah prinsip prinsip yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dan kebijakan pemerintah dalam dua arah *top-down* (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan *bottom up* (dari aspirasi desa ke pemerintah pusat). Musyawarah desa yang disingkat Musrenbang adalah forum dimana pihak pemerintah menyusun rencana pembangunan daerah. ditingkat desa/kelurahan adalah forum musyawarah oleh pemerintah desa dengan masyarakat untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan, dengan mengarahkan kepada rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM) yang sudah disepakati oleh pemerintah desa, Undang-Undang yang mengatur tentang Musrenbang ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Musrenbang Desa ialah sebuah forum musyawarah tahunan yang diikuti oleh pemerintah daerah, seluruh anggota dari pemerintah desa dan masyarakat untuk menyepakati Rencana Pembangunan Kerja (RKP) yang diselenggarakan per 1 Januari (Pertahun). Musrenbang ini bermakna akan mampu membangun

kesepahaman tentang pentingnya perencanaan pembangunan yang dilihat dari potensi dari dalam maupun dari luar (Permen, 2010).

Musyawarah perencanaan desa ialah mekanisme perencanaan, sebuah usulan yang diberikan oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan nantinya akan di program oleh pemerintah (A. Mustanir, 2017).

Musrenbang dilakukan untuk mengsinkronisasi berbagai kebutuhan masyarakat yang di peroleh dari forum kegiatan Musyawarah Perencanaan dan dari hasil musyawarah tersebut akan dijadikan usulan untuk dilaksanakan di Desa atau dibahas kembali ditingkat Kecamatan (A. Msutanir, 2018).

Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, hingga dibawa ke tingkat Nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penyelenggara kegiatan musrenbang kerap memperhatikan aspek partisipasi secara luas, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang lebih baik (Damis Dadda et al, 2019)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk menghasilkan data yang dijadikan bahan penelitian, sesudah itu penelitian tersebut diambil untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Hadi (2005) menyatakan bahwa metodologi penelitian ialah suatu usaha penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang ilmiah yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Hendryadi, et. al, (2019:218) Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, Metode Kualitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, data yang didapatkan cenderung kualitatif, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, melihat fenomena asumsi dasar.

Penelitian Kualitatif ialah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di teliti (Moleong 2017). Model penelitian dekriptif maksudnya adalah mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui metode deskriptif ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian penulis tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Langkah-Langkah dalam pelaksanaan penelitian serta dekstiptif ini adalah sebagai berikut : diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informan

yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan peneliti.

3.2 Informan

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis (Sugiono, 2010:300). Pada penelitian ini penulis tidak melaksanakan analisa terhadap populasi sebab seluruh responden yang diwawancarai ialah informan yang dikira mengenali tentang masalah yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan Gampong. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *non probability sampling*. *non probability sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang dan kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi (Sugiono, 2010:120). Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* (Sugiyono (2010:122) Mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, maksudnya penelitian menentukan sendiri informan yang ingin yang di wawancarai oleh si peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik/Mantan Pj. Keuchik	2
2	Sekretaris Desa	1
3	Tuha Peut	1
4	Kasi Urusan Perencanaan	1
5	Tokoh Masyarakat	1
6	Kepala dusun	6
7	Masyarakat	6
Jumlah		18

3.3 Posisi Riset

Posisi riset ialah tempat dimana riset dilangsungkan, dengan diresmikan posisi pada riset, hingga hendak lebih gampang buat mengenali tempat dimana sesuatu riset dicoba. Riset yang penulis jalani bertempat di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017;193) data primer ialah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer

didapatkan dari subjek penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Kantor Keuchik, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:137) data sekunder adalah sumber data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung daripada sumber data primer, Contohnya bacaan, buku-buku, Dokumen dan literatur yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara (Sugiyono, 2010:193).

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan

lain-lain. Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mempelajari jurnal dan surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data apabila studi pendahuluan ingin dilaksanakan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam (Sugiyono, 2017:194). Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan pengajuan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan focus permasalahan yang sedang diteliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2017;203) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Dua proses penting dalam observasi yaitu pengamatan dan ingatan, yaitu memperhatikan apa yang terjadi dilapangan secara akurat lalu mencatat temuan di lapangan dan mengaitkan dengan fenomena yang ada. Observasi yang dilakukan penelitian ini yaitu observasi *nonpartisipan* dimana peneliti tidak terlihat langsung dilapangan, peneliti hanya menjadi pengamat yang *independen*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman tentang data serta menyajikan kepada orang lain apa yang ditemukan dari semua rangkupan wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang terkumpul (Sugiyono (2018:482).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu pembahasan secara menyeluruh melalui data-data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang terjadi ditempat penelitian dilakukan.

3.7 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan untuk menguji data yang diperoleh sekaligus membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah. pengujian kredibilitas data pada penelitian kualitatif meliputi uji *crebility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Adapun uji kredibilitas data yang dapat dilakukan agar data pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

1. *Credibility*(Derajat Kepercayaan)

Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan agar tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah ketekunan pengamatan dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar belakang penelitian. Pada penelitian ini penulis kembali memeriksa masalah latar belakang dan memastikan data yang didapat apakah sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

2. *Transferability*(Keteralihan)

Konsep yang menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan berlaku dan dapat diaplikasikan pada semua situasi dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara tepat mewakili populasi tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan informan untuk memastikan kebenaran data yang didapat dengan mempertimbangkan pemilihan informasi yang dianggap paling dekat dengan permasalahan yang diteliti, tentunya dengan kriteria yang menurut penulis paling mendekati.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Ketergantungan data peneliti dapat ditentukan melalui teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis penelitian. Pada penelitian ini penulis mengecek kembali kebenaran data yang didapat baik dari surat kabar maupun dari hasil wawancara dengan kejadian yang ada dilapangan

4. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian data peneliti dapat ditentukan dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya. Pada penelitian ini penulis menelusuri kembali kebenaran dan menyesuaikan semua data yang didapatkan baik dari wawancara, surat kabar, sampai dengan kenyataan dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Gampong Drien Rampak ialah termasuk Gampong yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dipekirakan luas daerah tersebut kurang lebih 120 Hektar Persegi. Adapun batas-batas dari Gampong Drien Rampak ialah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gampong Gampa/Gampong Darat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gampong Rundeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gampong Ujong Baroh
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gampong Seuneubok

Gampong Drien Rampak terbagi atas 6 Dusun yaitu : Dusun Bangkawali, Dusun Seulanga, Dusun Jeumpa, Dusun Meulur, Dusun melati, Dusun Kepula.

Gampong Drien Rampak mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 yang di ambil dari Kantor Keuchik Gampong Drien Rampak adalah 6.933 antara lain Perempuan berjumlah 3.574 dan laki-laki 3.359 dan jumlah KK 1.640 dan adapun Tabel yang menjabarkan jumlah masyarakat perdesun antara lain :

4.1 Jumlah penduduk di Gampong Drien Rampak

No	Nama Jurong/Dusun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Penduduk
1	Bangka Wali	495	945	890	1.785
2	Seulanga	150	470	434	922
3	Jeumpa	246	485	467	989
4	Meulur	191	351	351	806
5	Melati	318	600	600	1.236
6	Keupula	240	617	617	1.195
Jumlah	Jumlah	1640	3.359	3.359	6.933

Sumber : Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2021

Penduduk di Gampong Drien Rampak sangat bermacam-macam seperti PNS, TNI/POLRI, Nelayan/Perikanan, Listrik Gas dan Air, Petani, pemburuan, dan lain-lain. Jenis pekerja penduduk dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Mayoritas pekerjaan dari masyarakat di Gampong Drien Rampak ialah perdagangan dan jasa.

4.2 Jumlah Pekerja di Gampong Drien Rampak

No	Bidang Usaha	Jumlah	Persentase
1	PNS/TNI-POLRI	364	15,85 %
2	Nelayan dan Peternekan	37	1,61%
3	Listrik, Gas, dan Air	133	5,79%
4	Pertanian, Pemburuan, dan Kehutanan	25	1,08%
5	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	344	14,98%
6	Bangunan, Konstruksi, Tukang	516	22,47%
7	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	142	6,18%
8	Dokter, Perawat dan Bidan	155	6,75%
9	Jasa-Jasa Lainnya	580	25,26%
	Total	2.296	100%

Tabel 4.2 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2021

Dalam Hal Pencari pekerjaan menurut tingkat dan klasifikasi pendidikan Gampong Drien Rampak adalah di tingkat SMA dan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

4.3 Jumlah Para pencari pekerjaan menurut tingkatan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pecari Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	150	56	206
2	SMP	50	-	50
3	SMA	228	59	287
4	Diploma	99	73	172
5	Sarjana	166	85	271
JUMLAH		713	273	986

Tabel 4.3 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2022

Adapun Sarana dan prasarana yang ada di Gampong Drien Rampak Antara Lain Sarana Pendidikan, Sarana Tempat Ibadah, Sarana Kesehatan dan Sarana tempat umum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

4.4 Jenis Sarana dan Prasarana Sekolah di Gampong Drien Rampak

No	Sarana dan Prasana Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD/MIN	1
3	SLTP/SMP	-
4	SLTA/SMA/MAN	2
Jumlah		4

Tabel 4.4 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2022

4.5 Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan di Gampong Drien Rampak

No	Sarana dan Prasarana Kesehatan	
1	Puskesmas/Pustu	-
2	Praktek Dokter	3
3	Klinik	4
4	Apotik	4
5	Jumlah Dokter	78
6	Jumlah Bidan Desa	1
7	Jumlah Mantri	2
8	Jumlah Perawat	76
Jumlah		168

Tabel 4.5 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2022

4.6 Jenis Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah di Gampong Drien Rampak

No	Sarana Tempat Ibadah	Jumlah
1	Meunasah	2
2	Mesjid	4
Jumlah		6

Tabel 4.6 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2022

4.7 Jenis Sarana dan Prasarana Umum di Gampong Drien Rampak

No	Sarana dan Prasana Umum	Jumlah
1	Gedung Pemerintahan	7
2	Lapangan Bola Kaki	1
3	Lapangan Voli	1
4	Gedung Bulutangkis	-
5	Sanggar Seni	-
6	Kuburan Umum	1
7	Kuburan Keluarga	-
Jumlah		10

Tabel 4.7 Sekretariat Gampong Drien Rampak, 2022

4.1.1 Visi dan Misi Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

1. Visi Gampong Drien Rampak

“Mendengarkan segala aspirasi masyarakat, meneguhkan militansi dan intelektualitas masyarakat demi persatuan bersama, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, serta menjadikan Gampong Drien Rampak sebagai percontohan di dalam kabupaten Aceh Barat”

4.1.1.2 Misi Gampong Drien Rampak

1. Bersama seluruh masyarakat berusaha dan berjuang untuk kemajuan Gampong Drien Rampak.
2. Bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan Gampong, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial Politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Olahraga, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
3. Transparansi sumber keuangan dan pengeluaran Gampong, dimaksudkan agar setiap masyarakat Gampong Drien Rampak mengetahui Anggaran Dana Gampong setiap tahunnya.
4. Pembangunan yang merata diseluruh wilayah Gampong Drien Rampak.
5. Membangun kemitraan, baik dalam ataupun dari luar Gampong secara Produktif dan Efektif.
6. Melibatkan semua unsur dalam Gampong untuk menciptakan Pembangunan yang lebih baik.

7. Menciptakan rasa aman dan tenang bagi warga Gampong Drien Rampa.
8. Mengembangkan sikap toleransi dalam bermasyarakat yang lebih dalam pertimbangan musyawarah.
9. Mengembangkan teknologi informasi serta pengetahuan agama terhadap generasi penerus masa depan.
10. Memberikan solusi yang baik dalam keluhan-keluhan masyarakat.
11. Menampung semua kritik dan saran yang membangun agar terciptanya pemerintah yang adil, bersih dan bermatabat.

4.1.1.2 PROGRAM KERJA

1. Bidang Pemerintah Gampong.

Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Antara Lain :

- a) Memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan efisien.
- b) Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintah Gampong.
- c) Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintah Gampong.
- d) Meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintah Gampong yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset gampong untuk anggaran pembangunan dan hal lain yang dianggap perlu.

- f) Menyempurnakan peraturan-peraturan Gampong yang ada, demi kelancaran pembangunan gampong menuju perubahan istimewa.

2. Bidang Ekonomi.

Meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong dengan cara membangun sarana perekonomian meliputi :

- a) Pengaspalan jalan secara merata, memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
- b) Pembangunan sarana teknologi informasi untuk intelektualitas warga.
- c) Pembangunan sarana pelatihan mandiri menuju masyarakat mandiri.
- d) Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
- e) Menimalisirkan angka pengangguran dan kemiskinan dengan membangun lapangan pekerjaan secara teratur dan terkontrol.

3. Bidang Politik

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara berpolitik yang baik dan memberikan pengayoman serta pelayanan yang baik dalam meningkatkan kualitas intelektual, dan mengadakan sosialisasi seminar dalam memberantas kebodohan.

4. Bidang Agama

Membuat majlis ta'lim dalam majlis ta'lim ini dapat meningkatkan mutu pendidikan agama seperti sarana tempat pengajian, mendukung penuh kegiatan-kegiatan keagamaan, memberantas pendangkalan ilmu akidah, serta memberdayakan remaja mesjid dalam memakmurkan tempat ibadah seperti mesjid dan mushalla.

5. Bidang Sosial

Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar terciptanya keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong. Serta menciptakan kearifan lokal.

6. Bidang Olahraga

Mengembangkan serta meningkatkan semua kegiatan cabang olahraga yang ada di masyarakat, agar tumbuh bakat dan dapat berprestasi untuk membawa nama baik Gampong maupun Organisasi lewat *event-event* Olahraga, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional serta dapat mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

7. Bidang Seni dan Budaya

Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat dalam mengadakan pentas/lomba seni budaya bangsa.

8. Bidang Kamtibmas

Memberikan pelayanan kenyamanan hidup bermasyarakat, agar tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat. Mengaktifkan pos jaga, memberdayakan petugas Hansip, agar selalu siaga menanggulangi gangguan keamanan ketertiban dan koordinasi antara pemerintah Gampong dengan petugas Kepolisian.

4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Gampong Drien Rampak

1. Tugas dan Fungsi Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, adalah kesatuan dari adat dan budaya, bisa dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditingkat desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, dan hak tersebut sudah diakui oleh Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintah Gampong bertanggung jawab untuk mengatur Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk Anggaran pendapatan dan pembelajaan Gampong, Alokasi Dana Gampong tersebut di musyawarahkan di dalam kegiatan Musyawarah Desa, yang dipimpin oleh Keuchik dan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong/Tuha Peut dan dihadiri oleh masyarakat.

a) Kepala Desa/Keuchik

Kepala Desa atau di aceh disebut juga dengan sebutan Keuchik yaitu memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas

pemerintah Gampong, Kepala Desa atau Keuchik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 bahwasanya Kepala Desa atau Keuchik yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gampong seperti Pembangunan Gampong, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) Kepala Desa atau Keuchik memiliki beberapa fungsi yaitu penyelenggara Pemerintah Gampong, melaksanakan pembangunan untuk masyarakat Gampong, penetapan hokum di Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban Gampong, melakukan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Kepala desa atau Keuchik dapat melaksanakan pembangunan seperti sarana prasarana di Gampong, baik itu dari bidang infrastruktur, bidang sosial ekonomi, bidang keamanan atau kesehatan. Kepala Desa atau Keuchik dapat membina masyarakat ke arah yang lebih baik seperti pembinaan masyarakat dalam bidang politik sosial budaya, keagamaan, ketenagakerjaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Gampong, dan menjada kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya. Kepala Desa atau Keuchik mempunyai wewenang dijelaskan pada pasal (7) ayat (2) bahwasanya Kepala Desa atau Keuchik dapat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong, memegang kekuasaan dalam pengelolaan dana dan aset Gampong.

b) Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peut

Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peut adalah lembaga Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut bisa dikatakan sebagai parlemennya Gampong. Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut dapat disebutkan dengan nama lain lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi atas keterwakilan masyarakat Gampong. Fungsi dari badan permusyawaratan Desa/Tuha Peut ini ialah lembaga yang akan mengawasi jalannya pemerintah Gampong yang di pertanggung jawabkan oleh Keuchik dan mengawasi jalannya pembangunan Gampong. Hak daripada Badan Permusyawaratan Gampong/Tuha Peut dapat memberhentikan Keuchik ketika sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peut adalah pelaksana dari kegiatan musyawarah pembangunan desa yang diikuti oleh pemerintah Gampong dan masyarakat, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Gampong/Tuha Peut ini adalah lembaga perwakilan dari masyarakat. Dimana Lembaga ini mengawasi tentang alokasi dana desa, peraturan perundang-undangan di desa, dan pemanfaatan alokasi dana desa.

c) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa ialah staf yang dipilih untuk membantu Kepala Desa/Keuchik dalam pengelolaan keuangan Gampong dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Keuchik adapun tugas dari sekretaris desa ialah :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti surat menyurat, arsip, ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi pendapat dan pengeluaran, serta administrasi pendapatan Kepala Desa, BPD, dan lembaga desa lainnya.
- Menyusun perencanaan anggaran dan pembelajaan desa, monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

d) Perangkat Desa

Perangkat desa yakni bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa dan memiliki tugas dalam menolong seseorang kepala desa dalam menjalankan tugas serta wewenang kepala desa tersebut dalam melakukan pemerintahan dari desa tersebut serta keperluan dari warga di desa dimana tempat tugasnya. Cocok dengan Undang- Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa dipaparkan kalau kewenangan dalam penaikan dan pemberhentian seseorang bagian dari pemerintahan desa merupakan wewenang dari seseorang kepala desa, hendak namun didalam melakukan wewenangnya itu pastinya seseorang kepala desa senantiasa wajib cocok dengan peraturan yang sudah diatur didalam undang- undang maupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa ialah bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga dimana tempat ia bertugas, seseorang fitur desa pula turut dalam menolong tugas yang dijalankan oleh seseorang kepala desa dalam membagikan pelayanan yang cocok dengan apa yang di idamkan oleh warga setempat, oleh karena itu segala fitur desa pula diharuskan memiliki suatu komitmen, kemampuan, keahlian, perasaan serta atensi yang tulus dan pula membutuhkan suatu rasa hirau yang besar oleh seseorang fitur desa guna melakukan tugasnya ialah melayani warga. Dengan tujuan supaya warga yang dilayani memperoleh rasa yang aman serta puas dalam pelayanan yang sudah dicoba dari fitur desa tersebut sehingga bisa membagikan pemecahan terhadap seluruh kasus yang ada di desa tersebut.

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan permusyawarahan desa.

Pemerintah Desa adalah utusan dari Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab mengatur dan bertanggung jawab terhadap Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk Anggaran Pembelajaran Desa, Alokasi tersebut di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan musyawarah Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh Keuchik, di bantu Pemerintah desa dan Tuha Peut dan di hadiri oleh Masyarakat. Dimana masyarakat disini berfungsi sebagai memberi Aspirasi dan Asumsi kepada pemerintah Desa untuk kemajuan

pembangunan Desa. Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi Misi Gampong Drien Rampak, maka pemerintah desa gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai dusun yang ada di Gampong Drien Rampak.

Menurut Said Hamidi dan Teungku Helmi Asyek, selaku Keuchik dan mantan Keuchik Gampong Drien Rampak terkait dengan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak Sebagai Berikut :

“Menurut saya partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak masih tergolong kurang baik, dikarenakan masih banyak masyarakat di Gampong Drien Rampak yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan musyawarah yang diadakan oleh Gampong Drien Rampak hanya sebagian masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan musyawarah Gampong (Hasil Wawancara 11 Oktober 2022).”

Hal ini di benarkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peut Gampong Drien Rampak sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak menurut saya masih tergolong kurang baik dikarenakan masyarakat di Desa Drien Rampak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, karena kebanyakan masyarakat di Gampong Drien Rampak itu pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan yang mengikat (Hasil Wawancara 11 Oktober 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak masih tergolong kurang baik, dikarenakan waktu mereka yang sangat sibuk dan padat dengan pekerjaan mereka masing-masing.

Adapun peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak menurut Keuchik Said Hamidi sebagai berikut :

“Peran Kami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong Drien Rampak ialah dengan bersosialisasi dengan masyarakat, meningkatkan musyawarah tingkat dusun, meningkatkan musyawarah tingkat Gampong, merespon keluhan masyarakat, membentuk dan mengembangkan program usaha milik gampong (Hasil Wawancara 11 Oktober 2022).”

Hal ini di benarkan oleh Sekretaris Gampong Said Hamzah berikut wawancaranya :

“dalam hal meningkatkan partisipasi kami pihak pemerintah Gampong meningkatkan lagi dalam administrasi di Kantor Keuchik seperti halnya merespon keluhan-keluhan masyarakat, meningkatkan administrasi di bidang surat menyurat (Hasil Wawancara 11 Oktober 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak adalah dengan meningkatkan kinerja-kinerja daripada aparatur Gampong seperti hal nya bersosialisasi dengan masyarakat, musyawarah di Gampong, musyawarah di tingkat dusun, membentuk program usaha milik gampong, meningkatkan dalam bidang surat menyurat dan cepat tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat.

1. Peran Pemerintah Gampong dalam bersosialisasi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.

Adapun Peran Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam bersosialisasi kepala dusun Ahmadi Mahmud, Ilyas, Iskandar, T. Mahyu Danil, M. Jirin, Hamid sebagai berikut :

“kami meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara bersosialisasi dengan dekat ke masyarakat, seperti hal nya duduk di warung kopi bersama dengan sedikit-sedikit membahas tentang apa saja keperluan yang diperlukan oleh Gampong, dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti musyawarah-musyawarah yang kami adakan, dengan duduk bareng

setelah ba'da magrib dan ba'da isya (Hasil Wawancara 17 Oktober 2022).”

Hasil penuturan dari Keuchik tersebut di bantah oleh masyarakat Gampong Drien Rampak berikut penuturannya :

“Bahwasanya peran pemerintah Gampong dalam bersosialisasi dan meningkatkan partisipasi tersebut benar adanya akan tetapi tidak mungkin kami para perempuan untuk mengikuti sosialisasi yang di buat oleh Gampong dengan duduk di warung kopi dan di mesjid seharusnya ada sosialisasi dari ibu-ibu PKK yang di buat oleh pihak Gampong dan menurut saya di Gampong Drien Rampak lembaga PKK di sini tidak aktif, karena tidak adanya pemberitahuan luas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pkk tentang pengajian secara umum, akan tetapi lembaga tersebut hanya mengundang orang-orang terdekat dan yang berkepentingan di Gampong saja (Hasil wawancara 11 Oktober 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Gampong dalam bersosialisasi itu benar adanya akan tetapi bagi pihak perempuannya sendiri tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti di buatnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga PKK dan untuk laki-laki mungkin sosialisasi model yang dikatakan oleh pemerintah Gampong ini masuk akal dikarenakan sosialisasi dari penuturan Keuchik itu menunjukkan untuk laki-laki dan itu pun menurut peneliti tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak masyarakat yang laki-laki yang tidak duduk di warung kopi Gampong.

2. Peran Pemerintah Gampong dalam partisipasi masyarakat musyawarah ditingkat Dusun.

Peran Pemerintah dalam musyawarah ditingkat Dusun dapat dilihat dari wawancara dengan Tuha Peut Azhar.ID sebagai berikut :

“Peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan musyawarah ditingkat dusun dimana kegiatan yang dibuat untuk

memberitahukan kepada masyarakat apa saja aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan di Gampong Drien Rampak ini kurang berjalan dengan baik, dikarenakan hanya beberapa dusun yang membuat musyawarah di tingkat dusun ini dan dusun yang lainnya mereka mendatangi rumah ke rumah untuk menanyakan aspirasi dan keluhan dari masyarakat itu sendiri (11 Oktober 2022).”

Hal ini di benarkan oleh masyarakat di Dusun I dan V, Sebagai Berikut :

“ kami dari masyarakat Dusun I dan V tidak mendapatkan pemberitahuan tentang kegiatan pra musyawarah ditingkat dusun akan tetapi kami dari dusun tersebut sudah mengetahui kegiatan tersebut dari tetangga yang memang diundang, dan mengetahui dimana akan dilakukannya kegiatan tersebut di mesjid, akan tetapi kami daripada masyarakat kan malu akan menghadiri kegiatan tersebut tapi kami tidak di undang langsung oleh pihak kepala dusun, mungkin tidak adanya keaktifan dari pihak tokoh masyarakat di dusun I dan V dari tokoh masyarakatnya kurang aktif dalam menyampaikan kegiatan pra musrenbang ditingkat Dusun tersebut, makanya kami tidak menghadiri kegiatan tersebut (andri dan septiandar, 11 Oktober 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Gampong dalam membuat musyawarah ditingkat dusun itu benar adanya akan tetapi hanya dusun I dan V saja yang membuat musyawarah di tingkat dusun ini dan itu pun banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kegiatan musyawarah tingkat dusun ini, para pihak pemerintah Gampong hanya mengundang beberapa orang yang menurut mereka berpengaruh di dusun tersebut dan yang tidak berpengaruh mereka tidak undang ke kegiatan tersebut.

3. Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam Merespon keluhan masyarakat di Gampong Drien Rampak

Peran pemerintah Gampong dalam merespon daripada keluhan masyarakat berikut wawancara dengan Perangkat Gampong Niko Meisaldi berikut wawancaranya :

“Peran kami perangkat Gampong dalam merespon keluhan masyarakat sudah berjalan dengan baik, karena setiap keluhan dari masyarakat kami respon dengan baik dan di carikan solusi terbaik terhadap keluhan masyarakat ini, hal ini dibuktikan dengan ketentraman kehidupan bermasyarakat, tidak ada kesenjangan sosial, dan di Gampong Drien Rampak damai dan tentram karena kami selalu merespon dengan baik dan memberikan solusi terbaik atas pengaduan keluhan masyarakat di Gampong Drien Rampak (11 Oktober 2022).”

Hal ini di bantah oleh masyarakat yang bernama abu yaitu tokoh masyarakat di Gampong Drien Rampak, berikut wawancara dengan abu :

“dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah memberikan respon cepat dalam keluhan dari masyarakat di Gampong drien Rampak, akan tetapi respon dari kepala dusun ke masyarakat menurut saya masih kurang bagus, dimana dari pengaduan dari masyarakat Gampong Drien Rampak, pemerintah Gampong seperti mengabaikan pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan kepala Dusun susah untuk ditemui karena banyak dari kepala dusun yang terikat kerja dengan pihak lain, dan ada beberapa kasus yang saya dengar dari masyarakat yaitu sering banjirnya di daerah dusun V sampe dusun VI dimana dalam hal ini setiap hari hujan lebat mereka mengalami banjir, keluhan ini sudah di keluhkan dari pemerintah Gampong supaya dicarikan solusi, akan tetapi sampai saat ini di tempat tersebut masih mengalami banjir diwaktu hujan lebat (11 Oktober 2022)”.

Dapat disimpulkan bahwasanya peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi dengan merespon keluhan masyarakat ini tidak ada, keluhan masyarakat tersebut belum teralisasi oleh pemerintah Gampong dan tidak adanya tindak lanjut oleh Gampong untuk memperbaiki saluran Drainaser sehingga banjir akan terjadi setiap hujan lebat.

4. Peran Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi dengan musyawarah di tingkat Gampong

Menurut Insinyur Said Hamidi selaku Keuchik dalam meningkatkan partisipasi dalam musyawarah di dusun ialah :

“Bahwasanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak kami membuat sebuah musyawarah di tingkat Gampong Drien Rampak, dengan dibuatnya musyawarah di tingkat Gampong ini, dimana dari perwakilan setiap dusun untuk ikut andil dalam kegiatan pembangunan dan memberitahukan tentang kemana saja arah aliran dana yang kami kerahkan untuk pembangunan, supaya masyarakat percaya dengan pemerintah Gampong yang menjadi penanggung jawab di Gampong Drien Rampak, dan dalam musyawarah ini pemerintah Gampong Drien Rampak seperti acuh tak acuh dalam musyawarah ini, dimana kami sudah mengundang beberapa perwakilan di setiap dusun akan tetapi di hari dimana di gelar musyawarah tersebut masih banyak dari masyarakat Gampong yang tidak datang di musyawarah tersebut (11 Oktober 2022).”

Hasil Wawancara tersebut dibantah oleh masyarakat Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat :

“bahwasanya pemerintah Gampong tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang kegiatan yang dibuat oleh Gampong di tingkat Dusun hanya orang-orang tertentu saja yang diundang dalam kegiatan tersebut, mungkin karena dana yang kurang cukup untuk menampung banyak masyarakat, dan kami masyarakat Gampong tidak tau terhadap kegiatan musdes tersebut (11 Oktober 2022).”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Gampong hanya mengundang masyarakat yang menurutnya dapat ikut andil dalam kegiatan musdes tersebut akan tetapi bagaimana dengan masyarakat yang mau hadir tapi tidak di undang ke dalam acara tersebut, menurut penulis disini pemerintah Gampong dan masyarakat masih mempunyai sosial yang kurang dan masyarakat hanya berfikir masyarakat desa hanya meminta dana untuk kegiatan, akan tetapi aspirasi mereka tidak di hiraukan.

5. Peran Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi dengan dalam membentuk dan pengembangan program usaha milik Gampong (BUMG)

Adapun peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi dengan cara membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong, berikut ini

wawancara dengan mantan Keuchik Gampong Drien Rampak yaitu Tgk. Helmi Asyek :

“kami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak adalah membentuk dan mengembangkan program usaha milik Gampong untuk menaikkan taraf ekonomi di Gampong Drien Rampak, dimana anak-anak muda yang belum bekerja di Gampong Drien Rampak kami memberi tanggung jawab tersebut untuk mereka supaya mereka bisa menaikkan taraf ekonomi mereka, dimana dalam hal ini saya membuat sebuah BUMG yaitu membuat Galon isi ulang yang diserahkan kepada masyarakat Gampong Drien Rampak untuk dikembangkan, ada juga peternakan ayam potong, dan peternakan ikan lele (11 Oktober 2022).”

Hal ini dibenarkan oleh Masyarakat Gampong Drien Rampak yaitu Andri,

berikut wawancaranya :

“betul adanya Badan Usaha Milik Gampong ini di dibentuk dan kembangkan akan tetapi kepada tidak adanya pemberitahuan untuk siapa proyek itu di kembangkan dan dikembangkan oleh siapa, mungkin dari Keuchik mereka sudah ada kandidat dan mereka tidak musyawarahkan kepada kami kepada siapa mereka percaya untuk mengembangkan BUMG tersebut, dan dari dibuatnya BUMG tersebut kami tidak pernah di kasih tau oleh pemerintah Gampong kemana arah dana yang di dapatkan oleh Gampong, apakah untuk pribadi untuk keuchik atau untuk pembangunan (11 Oktober 2022).”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Gampong dalam membentuk dan mengembangkan Usaha Milik Gampong adalah benar, dalam membentuk dan pengembangan Usaha Milik Gampong ini menurut peneliti tidak adanya keterbukaan pemerintah Gampong terhadap masyarakat di karenakan banyak masyarakat yang tidak tau tentang siapa pengurus dari Usaha Milik Gampong, kemana arah aliran dana yang di dapatkan dari Usaha Milik Gampong tersebut.

4.2.2 Hambatan Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi dalam kegiatan musyawarah Gampong Ditingkat Dusun.

1. Faktor Eksternal

Ada pun hambatan dalam faktor eksternal Perangkat Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai berikut menurut perangkat Gampong :

“hambatan eksternal yang kami hadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dimana masih banyaknya kepala dusun yang mempunyai pekerjaan lain selain menjadi kepala dusun dan itu masih ada kaitannya dengan Keuchik atau saudara keuchik, masih banyaknya kepala dusun dalam mengajak masyarakat dalam ikut andil dalam kegiatan desa itu mereka hanya memberi tahukan kepada beberapa orang saja, dan hanya beberapa dusun saja yang membuat musyawarah di tingkat dusun dan itupun mereka hanya memberi tahukan undangan lewat mulut dan hanya beberapa orang yang memang sedang ketemu dijalan dengan masyarakat itu, dan tidaknya adanya keterbukaan informasi tentang pendanaan Gampong, dan tidak adanya pemberitahuan tentang BUMG yang sedang dijalankan oleh Keuchik dan tidak tau kemana arah dana tersebut mengalir (11 Oktober 2022).”

Hasil Wawancara tersebut dibenarkan oleh Masyarakat Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat :

“bahwasanya hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Drien Rampak adalah dimana kurangnya fasilitas yang ada di Gampong, minim nya penghasilan asli Gampong, sehingga pada waktu kegiatan mereka kurang dalam pendanaan, kurang fasilitas yang di berikan pemerintah Gampong seperti tempat diskusi antar Kadus dan masyarakat, dan fasilitas di tingkat Gampong pun belum bisa menampung masyarakat lebih daripada 100 orang, kepala dusun hanya mengundang orang-orang terdekat dan menurutnya punya pengaruh yang besar terhadap pembangunan Gampong, sedangkan kami tidak diundang dan kami tidak di Tanya apakah kami ada keluhan dan aspirasi tentang pembangunan Gampong (11 Oktober 2022).”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya hambatan eksternal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dimana

ketidak profesional nya pemerintah Gampong dan tidak adanya keterbukaan antara Keuchik, perangkat Gampong dan masyarakat dalam pengelolaan dana Gampong.

2. Faktor Eksternal

Ada pun hambatan dalam faktor Internal menurut Tuha Peut Sebagai Berikut :

“Hambatannya adalah dimana masyarakat masih terbatasnya pengetahuan tentang musyawarah Gampong, masih adanya kesenjangan sosial di antara masyarakat, dimana masyarakat masih acuh tak acuh terhadap ajakan dari kami dalam menyukseskan kegiatan musyawarah yang gampong adakan.

Hal tersebut di benarkan oleh masyarakat Gampong Drien Rampak :

“masyarakat di Gampong Drien Rampak status sosial nya masih kurang, dimana kami mengajak masyarakat untuk datang dalam kegiatan musyawarah yang kami buat tapi mereka seperti acuh tak acuh, waktu kami datang ke rumahya orangnya tidak ada, waktu kami datang mereka mengusir, dan ada masyarakat yang antusias terhadap kegiatan yang kami buat tapi tidak hadir dalam kegiatan musyawarah yang kami adakan

Berdasarkan Hasil wawanacara diatas dapat disimpulkan bahwasanya hambatan internal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang musyawarah, masih adanya kesenjangan sosial antara masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ialah salah satu desa di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki penduduk yang banyak karena terletak di tengah tengah kota Meulaboh, dan terletak di daerah yang padat penduduk, dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari pemerintah desa dan masyarakat desa Drien Rampak Kurang Komunikasi (*Mis Communication*), karena pada saat pemerintah desa membuat sebuah kegiatan atau musyawarah ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui kapan, dimana di adakannya kegiatan atau musyawarah tersebut, mungkin mereka sibuk berkerja ataupun mereka acuh tak acuh terhadap kegiatan atau musyawarah yang di buat oleh pihak pemerintah desa, atau mungkin dari pihak pemerintah desa tidak menyeluruh untuk memberitahukan kegiatan ataupun musyawarah yang di adakan oleh pemerintah desa, dan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat adalah mengusul pendapat, dan berkontribusi dalam kegiatan pembangunan desa.

5.1 Peran Pemerintah Desa Drien Rampak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan musyawarah Desa.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang sangat penting terhadap pembangunan desa, supaya masyarakat mendapatkan wawasan dan wewenang

untuk memecahkan masalah dengan pemerintah Gampong. Kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Gampong. Partisipasi masyarakat mempunyai tujuan yaitu masyarakat dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah yang di hadapi oleh pemerintah baik itu dalam perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pertanggung jawaban sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan tersebut dan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan ide-ide untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang di buat oleh pemerintah desa sehingga inplementasi kegiatan menjadi lebih efektif, efesien dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak mempunyai peran penting dalam pembangunan Gampong, dan bagi masyarakat Gampong Drien Rampak sangat penting untuk terjun kedalam pembangunan desa untuk meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab, mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat, serta memberikan dukungan dan penerimaan untuk pemerintah Gampong Drien Rampak, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa tidaklah mudah dalam melakukan partisipasi masyarakat yang aktif. Diperlukan kondisi sosial masyarakat yang baik sehingga masyarakat sukarela dalam membantu kegiatan kegiatan yang di buat oleh pemerintah desa dan yang peneliti teliti di Gampong Drien Rampak ini sosial masyarakatnya masih tergolong kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang memandang status sosial.

Adapun beberapa peneliti dapat teliti tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gampong sebagai berikut :

5.1.1 Peran Pemerintah dalam Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan musyawarah pembangunan Gampong.

Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya dengan cara sosialisasi dan berdiskusi dengan masyarakat, dan para perangkat Gampong juga mendekati diri ke masyarakat dengan cara bersosialisasi langsung dengan masyarakat di tempat-tempat yang banyak di datangi oleh masyarakat seperti warung kopi, mesjid, dan tempat-tempat perkumpulan di sekitaran Gampong Drien Rampak. Pemerintah Gampong Drien Rampak langsung terjun kelapangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat di Gampong Drien Rampak dapat berpartisipasi dengan Pemerintah Gampong untuk keberhasilan dari pembangunan Gampong Drien Rampak, dan pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Gampong di katakan masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan pembangunan Gampong, dikarena berhasilnya pembangunan di Gampong atas ide ide dan aspirasi dari masyarakat yang tinggal di Gampong tersebut.

Pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasinya menurut pemerintah Gampong sudah sesuai dengan kewajiban mereka akan tetapi dalam sosialisasi tersebut masyarakat masih acuh tak acuh terhadap kegiatan musyawarah tersebut, dan pada dasarnya pembangunan di Gampong tersebut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri juga dan masyarakat menganggap bahwasanya pada kegiatan musyawarah tersebut walaupun mereka tidak

menghadiri kegiatan tersebut maka kegiatan tersebut berjalan dengan baik, peneliti dapatkan dalam peneliti ini masyarakat berpendapat bahwasanya pemerintah dalam membuat sebuah pendekatan dengan masyarakat hanya dengan kepentingan tertentu saja, masyarakat drien rampak menilai pemerintah Gampong tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat karena kepemimpinan Pj. Keuchik terdahulu mereka bahkan tidak di ikut sertakan dalam program-program pemerintah.

5.1.2 Peran Pemerintah dalam musyawarah di tingkat Dusun.

Peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membuka musyawarah di tingkat dusun, dimana pada pemerintah Gampong untuk menetralsir supaya tidak terjadinya hal-hal kecemburuan sosial masyarakat terhadap Pemerintah Gampong telah membuka musyawarah ditingkat Gampong, dengan dibuatnya musyawarah ditingkat Gampong ini akan memudahkan pemerintah Gampong untuk menampung aspirasi di masyarakat perdusun, dimana seperti yang di bahas dalam Bab IV, Gampong Drien Rampak terbatasnya fasilitas bangunan untuk menampung masyarakat untuk ikut andil dalam musyawarah di tingkat Gampong itu masih tergolong kurang memadai dikarena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Gampong hanya Gedung Kantor Keuchik dimana bangunan tersebut hanya menampung sekitar 100 orang saja.

Peran kepala Dusun disini dalam Bab IV menurut penulis masih kurang dikarenakan hanya Dusun jurong V dan jurong I saja yang menerapkan pra musyawarah ditingkat Dusun, musyawarah di tingkat Dusun ini diadakan pada tahun 2022, dan pada tahun-tahun belakang pemerintah Gampong tidak

membuat kegiatan pra musyawarah di setiap dusun, dan kepala dusun menyusulkan aspirasi masyarakat dengan aspirasi masyarakat itu sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat di setiap dusun dan masyarakat di Gampong.



Foto 1. Absensi musyawarah Dusun

Foto 2. Musyawarah Dusun

5.1.3 Pemerintah Gampong Drien Rampak dalam Merespon keluhan masyarakat di Gampong Drien Rampak

Peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan masyarakat dengan menampung semua keluhan masyarakat tentang Gampong mau itu dari hal kecil maupun hal besar, baik itu dalam pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur maupun di pembangunan ekonomi sosial. Dalam hal ini pemerintah Gampong Drien Rampak sudah merespon keluhan masyarakat dengan baik, dimana masyarakat mempunyai keluhan tentang Gampong mereka menemui dan mengeluh kepada Kepala Dusun di setiap dusun yang ada di Gampong Drien Rampak dan dalam hal ini banyak dari masyarakat yang menanggah tentang hal tersebut.

Penulis dalam hal ini sangat menyayangkan pada hal respon pemerintah Gampong dalam ini masih sangat kurang, dimana pemerintah Gampong

masih tergolong *Low Respon* terhadap masyarakat Gampong Drien Rampak dimana dalam penuturan Tokoh Masyarakat yaitu Abu dalam wawancaranya dia mengatakan bahwa respon dari pemerintah Gampong dalam menampung keluhan masyarakat masih kurang, dimana pada bab IV dijelaskan bahwa pemerintah masih mengabaikan pengaduan dari masyarakat, seperti di Dusun V dan VI, dimana kalau hujan lebat mereka mengalami banjir dikarenakan masih banyaknya masyarakat atau orang yang berjualan di sekitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang masih membuang sampah di selokan yang menghubungkan antara pembuangan dari Gampong Drien Rampak ke Sungai Jembes.

Respon Pemerintah ini pun menjadi satu alasan kenapa Masyarakat dan Pedagang yang berjualan di depan Dinas tersebut masih membuang sampah sembarangan dikarenakan tidak ada peraturan dari pihak Gampong yang mengatur tentang pembuangan sampah tersebut dan tidak adanya ketegasan dari pemerintah Gampong untuk memotivasi masyarakat dalam gotong royong untuk membersihkan selokan tersebut.

Peran pemerintah Gampong pun disini yang dapat peneliti simpulkan bahwasanya Respon terhadap masyarakatnya masih kurang dimana tidak ada ketegasan dari pemerintah Gampong untuk mengatur dan memberitahukan kepada masyarakat tentang keluhan masyarakat yang menjadi korban.

5.1.4 Peran Pemerintah Gampong Dalam Musyawarah Di Tingkat Gampong.

Peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membuatnya musyawarah di tingkat Gampong dalam hal ini diharapkan keterwakilan dari masyarakat di tingkat Dusun dapat berhadir dalam kegiatan musyawarah di tingkat Gampong supaya dapat terwakilnya masyarakat di setiap Dusun, dalam hal ini pun pemerintah Gampong sudah berupaya lebih untuk mengundang dan memberitahukan tentang kegiatan ini akan tetapi pada tanggal 05 November 2022, dimana pihak pemerintah Gampong mengadakan musyawarah di tingkat Gampong hanya 3 orang yang mengikuti musyawarah di tingkat Gampong ini dan yang lainnya adalah perangkat Gampong.

Musyawarah yang di adakan dalam musyawarah ini selain untuk menampung aspirasi masyarakat tapi untuk bisa sosialisasi langsung antara pemerintah Gampong dengan masyarakat Gampong Drien Rampak akan tetapi dari sekian banyak undangan yang di berikan oleh pemerintah Gampong hanya beberapa orang saja yang mengikuti disini dapat peneliti simpulkan bahwasanya peran pemerintah Gampong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meyakinkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah ini masih tergolong kurang.

Peran pemerintah dalam musyawarah tingkat Gampong dalam penuturan masyarakat Drien Rampak bahwasanya Undangan yang diberikan oleh pemerintah Gampong untuk mengikuti musyawarah tersebut tidak ada. Masyarakat berpikir bahwasanya mereka saja tidak diundang dalam kegiatan

musyawarah di tingkat Dusun apalagi di tingkat Gampong yang hanya orang-orang berpengaruh di Gampong dan tanpa mereka pun pembangunan Gampong juga akan jalan juga, dan pihak kepala dusun pun hanya mengundang orang-orang yang menurut patut ikut dalam musyawarah di tingkat Gampong.



Foto 3. Absensi Musyawarah Gampong

Foto 4. Musyawarah Gampong

5.1.5 Peran Pemerintah Gampong Dalam Membentuk Dan Mengembangkan Program Usaha Milik Gampong (BUMG).

Peran Pemerintah Gampong dalam membentuk dan mengembangkan program usaha milik Gampong (BUMG) dimana dalam hal ini pemerintah Gampong tidak bisa memilih kepada siapa usaha ini diberikan tanggung jawab. Banyak dari masyarakat Gampong yang masih bingung tentang pembuatan usaha milik gampong ini, dan arah dana dari usaha tersebut dari siapa dan untuk kepentingan siapa.

Masyarakat berpendapat bahwasanya peran pemerintah dalam membentuk dan mengembangkan usaha milik gampong ini masih kurang terbuka,

dikarenakan tidak adanya musyawarah terhadap masyarakat tentang siapa yang di beri tanggung jawab untuk mengembangkan usaha ini dan arah dana dari usaha tersebut untuk siapa. Seperti di katakana dalam bab IV bahwasanya tidak ada keterbukaan masyarakat tentang berapa pendapatan usaha tersebut, kemana arah dana tersebut, dan siapa penanggung jawab usaha tersebut. Disini masyarakat dengan tidak transparannya pemerintah Gampong menjadikan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah Gampong.

5.2 Hambatan Peran Pemerintah dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Hambatan Pemerintah Desa Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah Desa adalah tentang Pemahaman masyarakat sangatlah mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena dengan pemahaman yang baik maka masyarakat sendiri mengetahui tujuan dan fungsi dari apa yang mereka kerjakan, ialah dimana masyarakat Desa Drien Rampak ialah dimana masih banyak dari masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Desa dan kurang paham atas kegiatan tersebut, dan masyarakat di Desa Drien Rampak seperti acuh tak acuh terhadap kegiatan musyawarah di Desa, dan ditingkat dusun pun masyarakat yang diundang dalam diskusi pembentukan perencanaan pembangunan pun mereka tidak hadir seperti mereka tidak peduli dengan kegiatan yang dibuat oleh Desa.

5.2.1 Faktor Eksternal

1. Keterbatasan Tenaga Profesional

Peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, bahwasanya masih kurang nya tenaga yang professional dari Pemerintah Gampong sehingga pada saat perangkat Gampong mengundang dan bersosialisasi dengan masyarakat, pada saat itu masyarakat tidak mengerti tentang kegiatan apa yang dibuat oleh pemerintah Gampong seperti wawancara di Bab IV bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang kegiatan stunting yang dibuat oleh pemerintah pusat dan perangkat Gampong hanya mengundang orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menguntungkan diri sendiri, banyaknya kepala dusun yang tidak amanat karena kesibukan pekerjaan diluar dari pekerjaan yang di amanatkan oleh Keuchik.

2. Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Pemerintah Gampong

Peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, Pemerintah desa adalah sebagai perantara dan sekaligus membawa perubahan ternyata semakin tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Desa yang berubah dengan begitu cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah Gampong di Gampong Drien Rampak diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup

mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak kedudukan dan bentuk organisasinya dimana tidak adanya sumber pendapatan asli Gampong yang memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan salah satu kendala yang penting terhadap penghambat kinerja Pemerintah Gampong. Dalam organisasi pemerintah Gampong di Gampong Drien Rampak kurang mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, dikarenakan perangkat desa tidak menjalankan tugas daripada Keuchik sesuai dengan arahan keuchik akan tetapi mereka mengusulkan ide mereka sendiri tanpa melibatkan masyarakat dalam perumusan pembangunan desa.

5.2.2. Faktor Internal

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat

Peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dapat disimpulkan bahwasanya dapat dilihat dari beberapa faktor penghambat peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong demikian dapat dikatakan sebagian masyarakat juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Gampong Drien Rampak, sehingga mereka beranggapan bahwa sudah ada yang menangani lebih dalam masalah ini tentunya karena

masyarakat adalah mayoritas pegawai dan pengangguran, maka mereka merasa lebih baik mempergunakan waktu untuk mengurus kegiatan dan mencari kerja dari pada mengikuti kegiatan yang tidak dimengerti sehingga menyebabkan keengganan untuk berpartisipasi disamping itu masyarakat yang telah tahu malas untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan karena merasa ada yang lebih berhak dan takutnya kesalahpahaman antara Pemerintah Gampong dan masyarakat

2. Status Sosial masyarakat di Gampong Drien Rampak masih tergolong rendah

Peran pemerintah Gampong Drien Rampak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dapat disimpulkan bahwasanya faktor penghambat yaitu masih kurangnya status sosial masyarakat di Gampong Drien Rampak, dikarenakan interaksi sosial di Gampong Drien Rampak masih tergolong kurang di karenakan faktor usia, pekerjaan, pengangguran dan di masyarakat Gampong Drien Rampakpun yang peneliti temukan di lapangan antara tetangga sama tetangga saja tidak akrab dan saling tidak kenal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes Drien Rampak tahun 2022 adalah rendah, karena partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dilihat dari tingkat kehadiran rendah, respon masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam musrenbang untuk mengungkapkan pendapat usulan/saran juga rendah. Hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi akan dilaksanakannya kegiatan musrenbang oleh pemerintah Gampong sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan diadakannya kegiatan musrenbang tersebut. Serta tidak dilakukannya kegiatan pramusrenbang atau musyawarah tingkat dusun untuk membicarakan kebutuhan apa yang mereka butuhkan diwilayahnya Dusunnya, rancangan awal serta merta atas pemikiran kepala dusun, tidak ada dialog dengan masyarakat dusun di Gampong Drien Rampak masih kurang dalam hal sosial masyarakatnya.
2. Faktor penghambat masyarakat tidak mengikuti kegiatan musrenbangdes di Gampong Drien Rampak diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan hasil pembangunan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrenbang sehingga pengetahuan masyarakat tentang

pelaksanaan musrenbang sangat kurang. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti mereka pergi bekerja daripada mengikuti kegiatan musrenbang dikarenakan tidak adanya imbalan atau hadiah apabila masyarakat mengikuti kegiatan musrenbang, harus ada iming-iming hadiah supaya masyarakat pergi berpartisipasi dalam musrenbang. Dan masyarakat menganggap kehadiran Kepala Dusun sudah mewakili kepentingan mereka, serta masyarakat berpendapat bahwa pemerintah Gampong lebih tau tentang pembangunan apa yang mereka butuhkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah Gampong Drien Rampak agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi lebih meningkat. Disarankan kepada Pemerintah Gampong untuk membuat sebuah forum Musyawarah di tingkat dusun supaya aspirasi dari masyarakat tersebut disampaikan dan di wakikan oleh Kepala Dusun dan petinggi di Dusun.
2. Di dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak, alangkah baiknya apabila masyarakat tetap dilibatkan sampai tahap akhir penetapan perencanaan agar masyarakat mengetahui dan mengerti aspirasi yang mereka sampaikan dapat terkoordinasi oleh pemerintah Gampong atau Disarankan kepada pemerintah desa memberikan pengertian pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan

musrenbang demi meningkatkan keefektifan hasil pembangunan di Gampong.

Daftar Pustaka

Buku

- DR. Soedjono Abi Praja S.E, (2002). *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Air langga University Press, Surabaya.
- Dr. Sunyoto Usman, (2010). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Drs. N. Daidjoeni Dan Drs. A. Suyitno, (2004). *Pedesaan Lingkungan Dan Pembangunan*. PT Alumni, Bandung.

Jurnal

- Sarifah. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 2753–2766.
- Imtihan, H., Wahyunadi, & Firmansyah, M. (2017). PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Journal Trunojoyo*, 11(1), 3–5.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Studi, P., Publik, A., Sosial, I., & Politik, I. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda* & Beby Masitho Batubara. *Diterima: 11 Juli*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Dodi Zulfadli, D. (2019). *AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPATIF PENGELOLAAN DANA DESA (Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)* (Doctoral dissertation, universitas teknologi sumbawa).
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.
- Umar, I., Yuardani, A. M., & Rinaldi, H. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum. *Jurnal Eksos*, IX(2), 80–99.

<http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1205/04-ismail.pdf?sequence=1>

- Tarsila.Berna.Dianti.2015. *Strategi Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Universitas Tanjung pura, pontianak, volume 4 Nomor 3.
- Dahlan, dkk, 2012.Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Otoritas, Vol 2(1) : 44.
- Rahardjo Adisasmita TA. M.EC, (2006).*Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Erick Saputra, 2020, *Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*.

Nurcholis, C., & Rachman, A. S. (2011). kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota DepokK. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta*, 259–266.

Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(8), 287–294.
<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU NO.6 tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa UU NO .32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah Desa No .2 Tahun 2016 tentang indek Desa Membangun.

Permata Press. Edisi terbaru, *Undang-Undang Desa dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun Tentang Perubahan Peraturan Desa No. 60 tahun (2015) Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.Peraturan Mendagri No. 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan peraturan Desa*.

Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan desa

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH GAMPONG DRIEN RAMPAK DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN GAMPONG
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Keuchik dan Perangkat Gampong

1. Bagaimana peran bapak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak ?
2. Apa saja hambatan bapak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Drien Rampak
3. Sarana komunikasi seperti apa yang bapak tawarkan kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?
4. Bagaimana peran masyarakat dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan yang Gampong buat, apakah sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah Gampong?
5. Bagaimana bapak meyakinkan masyarakat bahwasanya kegiatan-kegiatan musrenbangdes itu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat ?

Wawancara dengan masyarakat

1. Apakah bapak keuchik melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap masyarakat ?
2. Apakah peran keuchik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah di realisasikan kepada bapak/ibu ?
3. Sarana apa saja yang dilakukan keuchik dalam meyakinkan bahwasanya kegiatan-kegiatan musyawarah tersebut penting bagi masyarakat
4. Apakah keuchik setiap ada musyawarah ada mengundang bapak/ibu dalam kegiatan tersebut?
5. Apa saja sarana yang diberikan oleh pemerintah gampong untuk kegiatan-kegiatan yang pemerintah Gampong buat?

LAMPIRAN 2

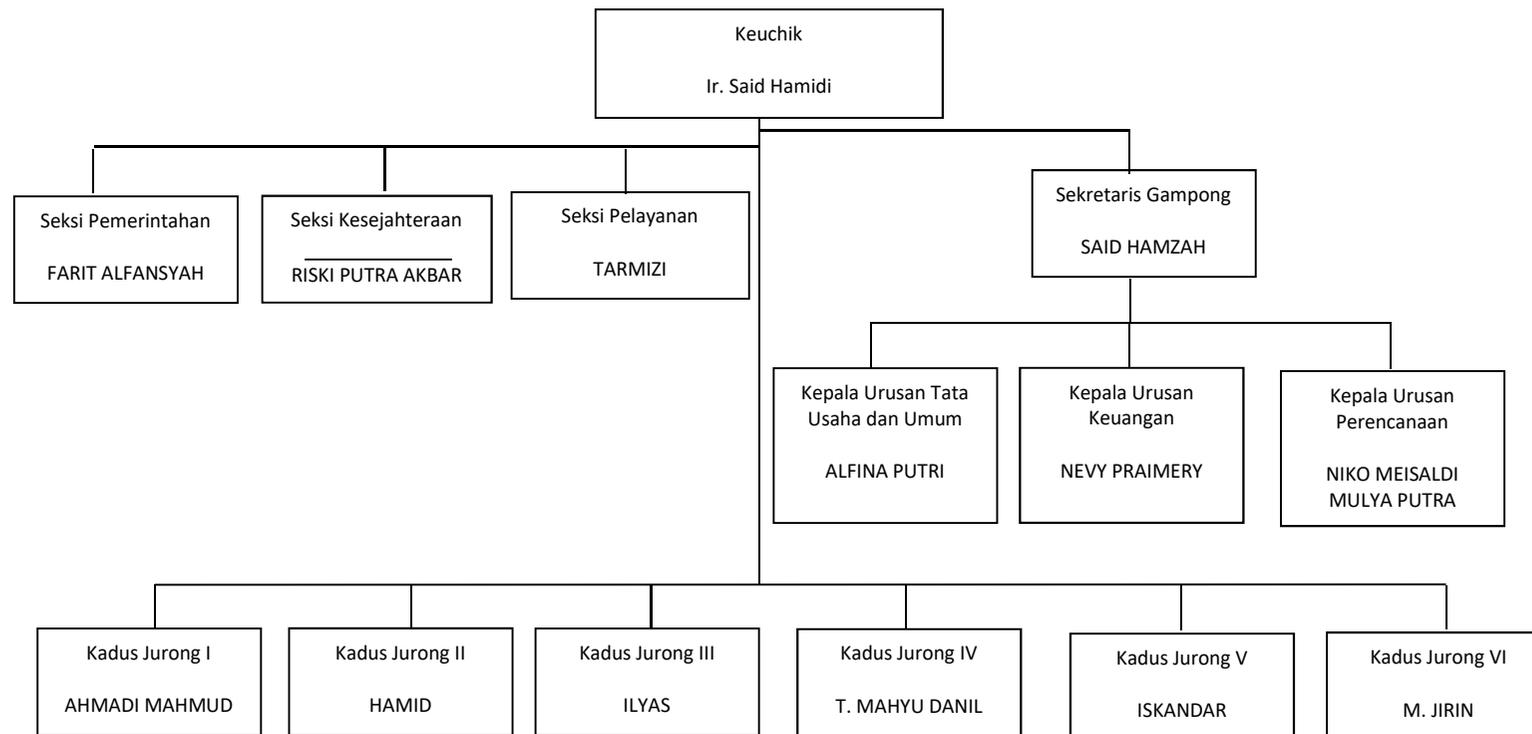
INFORMAN PENELITIAN

1. Keuchik Gampong Drien Rampak : Ir. SAID HAMIDI
2. Mantan Pj. Keuchik Gampong Drien Rampak :Tgk.HELMY ASYEK
3. Sekretaris Gampong Drien Rampak : SAID HAMZAH
4. Kasi Urusan Perencanaan Gampong Drien Rampak : NIKO MEISALDI
5. Tuha Peut Gampong Drien Rampak : AZHAR. ID
6. Kadus Jurong Seulanga Gampong Drien Rampak : HAMID
7. Tokoh Masyarakat Gampong Drien Rampak : ABU
8. Kadus Jurong Bangkawali Gampong Drien Rampak : AHMADI
9. Kadus Jurong Jeumpa Gampong Drien Rampak : ILYAS
10. Kadus Jurong Meulati Gampong Drien Rampak : ISKANDAR
11. Kadus Jurong Meulur Gampong Drien Rampak : T. MAHYU DANIL
12. Kadus Keupula Gampong Drien Rampak : M. JIRIN
13. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong V : SEPTIANDAR
14. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong I : ANDRI
15. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong VI : YUNUS
16. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong II : SAHROL
17. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong IV : HUSAINI
18. Masyarakat Gampong Drien Rampak Jurong III : FANI

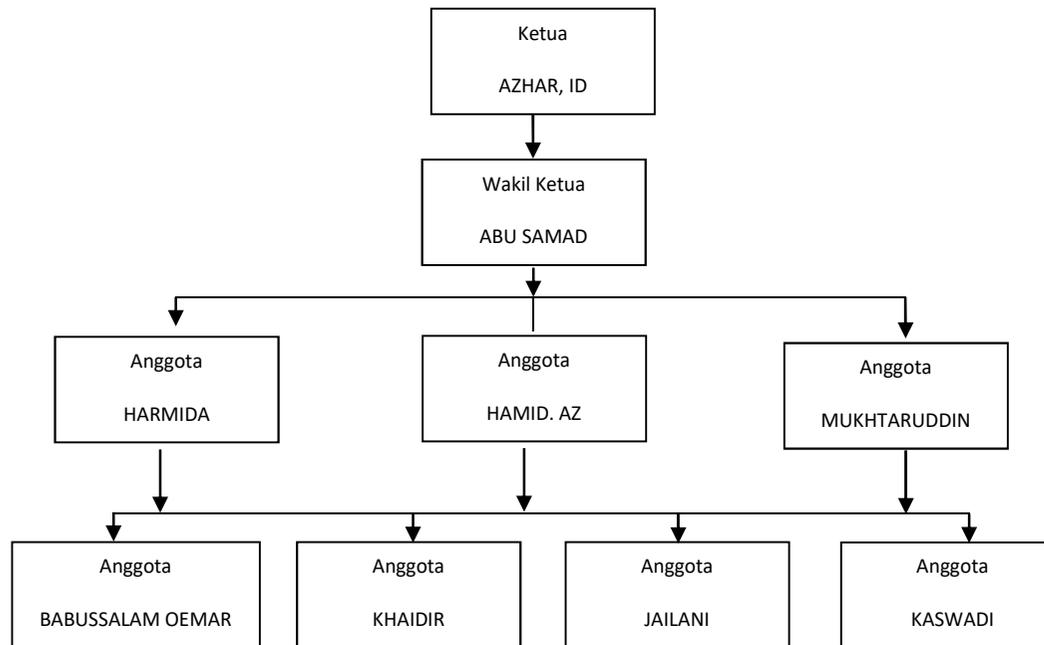
LAMPIRAN 3

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Drien Rampak



Struktur Organisasi Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Desa



LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admncgara@utu.ac.id

Meulaboh, 17 Juni 2022

Nomor : 230/UN59.5.1/PP/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Kegiatan
Peninjauan Lapangan**

Kepada Yth,

di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan peninjauan lapangan berupa survei dan pengamatan (observasi) serta Interview (wawancara) pada instansi yang Bapak/Ibu **pimpin untuk kepentingan peningkatan mutu proses belajar dan mengajar pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP-UTU**
2. Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan dukungan Bapak/Ibu agar sudi kiranya menerima mahasiswa kami untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud atas nama:

Nama : DICKY SAGITA PUTRA
NIM : 1505905010012
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Drien Rampak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



LAMPIRAN 5



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
GAMPONG DRIEN RAMPAK

Jalan Manek Roo Lr. Singa No. 185 Meulaboh

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /1824/ G.DR / 2022

Keuchik Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DICKY SAGITA PUTRA
Tempat/Tanggal lahir	: Meulaboh, 11-12-1995
NIM	: 1505905010012
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik
Universitas	: Universitas Teuku Umar

Telah selesai melakukan penelitian di Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan Judul “ **PERAN PEMERINTAH DESA DRIEN RAMPAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA** “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Drien Rampak, 01 November 2022
Keuchik Gampong Drien Rampak
Kecamatan Johan Pahlawan


Ir. SAID HAMIDI

LAMPIRAN 6



Foto 1. Keuchik Gampong Drien Rampak



Foto 2. Mantan PJ Gampong Drien Rampak



Foto 3. Sekretaris Gampong Drien Rampak



Foto 4. Kasi Pembangunan/Kegiatan Desa



Foto 5. Tuha Peut



Foto 6. Kadus Jurong Seulanga dan Tokoh Masyarakat



Foto 7. Kadus Jurong Bangkawali dan Kadus Jurong Meulur



Foto 8. Ketua Pemuda, Kadus Jurong Jeumpa dan masyarakat



Foto 9. Kadus Jurong Melati



Foto 10. Kadus Keupula



Foto 11. Masyarakat Gampong Drien Rampak



Foto 12. Masyarakat Gampong Drien Rampak



Foto 13. Masyarakat Gampong Drien Rampak



Foto 14. Masyarakat Gampong Drien Rampak

LAMPIRAN 6

BIODATA

Nama : DICKY SAGITA PUTRA
Tempat/Tgl Lahir : Meulaboh, 11 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Suku : Aceh
Alamat : Jalan sisingamangaraja No. 67, Gampong Drien Rampak,
Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
Status : Belum Menikah
Nomor Hp : 082274602460
Email : dicky171110@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Slamet Riyadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Cut Bayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jalan Sisingamangaraja No. 67, Gampong Drien Rampak,
Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.